DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA: ANALISIS KOMPARATIF PENGALAMAN MAHASISWA ADMINISTRASI NEGARA UNILA

Anisa Utami[1], Susana Indriyati Caturiani[2]

Universitas Lampung
anisa.utami2008@fisip.unila.ac.id

ABSTRACT

Abstract: This study aims to conduct a comparative analysis of the implementation of the Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) curriculum among students in the Public Administration Department, Faculty of Social and Political Sciences (FISIP), University of Lampung. The background of the study is grounded in the transformation of higher education policy that requires graduates to possess adaptive, innovative, and competitive competencies in the labor market. A quantitative research method was employed, using both descriptive and inferential approaches through surveys, interviews, and documentation. The sample consisted of students participating in the MBKM program and those who did not.

The findings reveal varying levels of student participation in the MBKM program across cohorts, with the highest participation among the 2019–2020 cohort (100%) and a significant decline in the 2021 cohort (44.5%), attributed to the introduction of an additional requirement—submission of a thesis outline. Academic performance data show that the average GPA of graduates falls within the "good" category (3.54–3.71), while on-time graduation rates range from 37% to 56%. Tracer study results indicate that MBKM participants experienced shorter job-search periods compared to non-participants and demonstrated improved professional skills, soft skills, and job readiness.

Nevertheless, the implementation of the MBKM program still faces challenges, including faculty readiness, limited industry partnerships, and administrative barriers. Therefore, enhancing the quality of MBKM implementation through improved student competencies, academic supervision, and collaboration with the professional world is essential to aligning the curriculum with labor market demands. This study concludes that the MBKM curriculum has a positive impact on learning quality, graduation acceleration, and graduate competitiveness, and thus can serve as a reference for curriculum policy development in higher education.

Keyword: *Merdeka Belajar, MBKM, Comparative Study*

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif penerapan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) pada mahasiswa Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung. Latar belakang penelitian didasarkan pada transformasi kebijakan pendidikan tinggi yang menuntut lulusan memiliki kompetensi adaptif, inovatif, dan siap bersaing di dunia kerja. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan inferensial melalui survei, wawancara, serta dokumentasi, dengan sampel mahasiswa yang mengikuti program MBKM dan mahasiswa non-MBKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi mahasiswa dalam MBKM bervariasi antar-angkatan, dengan angka tertinggi pada angkatan 2019–2020 (100%) dan penurunan signifikan pada angkatan 2021 (44,5%) akibat diberlakukannya syarat tambahan berupa pengumpulan outline skripsi. Data capaian akademik memperlihatkan rata-rata IPK lulusan berada pada kategori baik (3,54–3,71), sedangkan tingkat kelulusan tepat waktu bervariasi antara 37 56%. Tracer study mengungkapkan bahwa mahasiswa peserta MBKM memiliki waktu tunggu kerja lebih singkat dibandingkan non-MBKM, serta menunjukkan peningkatan keterampilan profesional, soft skills, dan kesiapan kerja. Meskipun demikian, implementasi MBKM masih menghadapi tantangan berupa kesiapan dosen, keterbatasan mitra industri, dan hambatan administratif. Oleh karena itu, penguatan mutu pelaksanaan MBKM melalui peningkatan kompetensi mahasiswa, kualitas bimbingan, serta kolaborasi dengan dunia kerja menjadi kunci dalam mendukung relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kurikulum MBKM memiliki dampak positif terhadap kualitas pembelajaran, percepatan kelulusan, dan daya saing lulusan, sehingga dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan kurikulum di perguruan tinggi.
Kata Kunci : Merdeka Belajar; MBKM; Studi Komparatif

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi di Indonesia terus mengalami perubahan kebijakan kurikulum seiring perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum 2013 (K 13) yang sebelumnya digunakan di berbagai jenjang pendidikan termasuk perguruan tinggi, menekankan pada penguatan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terpadu. Namun, seiring munculnya tantangan global dan tuntutan terhadap lulusan yang adaptif, inovatif, dan mampu berpikir kritis, pemerintah kemudian meluncurkan kebijakan baru melalui konsep Kurikulum Merdeka Belajar. Kampus Merdeka Belajar adalah sebuah kebijakan yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, yang memberikan peluang kepada mahasiswa untuk menempuh proses pembelajaran selama tiga semester di luar program studi asalnya. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan bagian dari

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

kurikulum yang disusun untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam memperoleh keterampilan sebagai bekal saat menyelesaikan pendidikan diploma maupun sarjana (Krisnanik et al., 2021). Melalui program ini, mahasiswa memiliki peluang untuk mempelajari pengetahuan serta keterampilan baru di luar bidang studi utamanya, yang dapat berguna untuk meningkatkan kompetensi setelah lulus dari perguruan tinggi (Yuherman et al., 2021). MBKM menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan mahasiswa, karena mencakup proses pembelajaran tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga melalui pengalaman lapangan. Program ini dirancang secara nasional untuk diterapkan di seluruh program studi di Indonesia, dengan harapan mampu memberikan dampak positif bagi lulusan setelah menyelesaikan program pendidikan. Landasan hukum pelaksanaan kebijakan MBKM meliputi beberapa regulasi utama, antara lain: Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum; Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri; serta Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta. Tujuan utama dari kebijakan MBKM adalah untuk mendorong mahasiswa dalam menguasai berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan bidang keahliannya, agar mereka mampu bersaing secara global (Baharuddin, 2021; Fatmawati, 2020; Tohir, 2020). Melalui kebijakan ini, mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, bukan semata berdasarkan kurikulum wajib yang ditentukan oleh program studi. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga memberikan kewenangan otonom kepada perguruan tinggi dalam merancang sistem pembelajaran. Hal ini didasarkan pada perubahan paradigma pendidikan yang diarahkan menjadi lebih terbuka dan inovatif. Pelaksanaan MBKM mendorong sistem pembelajaran di perguruan tinggi agar menjadi lebih fleksibel dan mandiri. Terdapat lima kebijakan utama dalam paket Kampus Merdeka, yaitu: a) sistem akreditasi perguruan tinggi; b) hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi; c) kemudahan dalam membuka program studi baru; d) proses penerimaan mahasiswa baru yang lebih terbuka; dan e) perubahan status perguruan tinggi menjadi berbadan hukum. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku untuk bidang Pendidikan dan Kesehatan. Lebih lanjut, pemerintah juga berusaha untuk

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

menurunkan angka pengangguran dengan menyelaraskan sistem pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Dengan demikian, lulusan perguruan tinggi diharapkan menjadi tenaga kerja yang siap pakai dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Upaya ini direalisasikan melalui kebijakan MBKM sebagai bentuk respons terhadap tantangan tersebut. Keberhasilan implementasi kebijakan MBKM sangat ditentukan oleh sejauh mana perguruan tinggi mampu menghadirkan proses pembelajaran yang bersifat otonom dan fleksibel. Tujuannya adalah agar dapat terbentuk kultur pembelajaran yang inovatif, tidak kaku, serta sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing institusi. Oleh karena itu, program studi dituntut untuk mengembangkan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja dan memenuhi capaian pembelajaran yang ditargetkan. Di samping itu, keterampilan yang diperoleh mahasiswa sangat dipengaruhi oleh pengalaman belajar mereka selama masa studi. Pengalaman belajar mampu memberikan motivasi yang kuat kepada mahasiswa karena melalui pengalaman tersebut, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menarik (Fryer et al., 2019). Ketika pengalaman belajar dirancang secara optimal, maka akan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa yang mungkin tidak dapat diperoleh melalui metode konvensional di dalam kelas (Chao et al., 2016). Oleh karena itu, pendekatan berbasis pengalaman menjadi metode yang efektif dalam memperkaya aktivitas pembelajaran baik secara internal maupun eksternal. Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung merupakan salah satu institusi yang mengalami transisi dari penerapan Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka Belajar. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana perbedaan penerapan kedua kurikulum ini dirasakan oleh mahasiswa dan dosen, serta sejauh mana kurikulum tersebut berdampak terhadap proses dan hasil pembelajaran mahasiswa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi pengembangan kebijakan kurikulum, pelaksanaan program MBKM, serta perencanaan tracer study di masa yang akan datang.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) umumnya masih berfokus pada aspek konseptual dan evaluasi umum terhadap implementasi program, seperti persepsi mahasiswa dan dosen, kesiapan institusi, serta analisis deskriptif terkait pelaksanaan program di berbagai perguruan tinggi. Penelitian penelitian tersebut belum banyak menggali secara mendalam dampak konkret MBKM terhadap capaian

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

pasca-kampus mahasiswa, khususnya dalam konteks kesiapan kerja dan waktu tunggu mendapatkan pekerjaan. Fokus pada mahasiswa Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung juga memberikan kontribusi kontekstual yang spesifik, karena sebagian besar studi terdahulu lebih banyak dilakukan secara umum lintas prodi atau pada program studi vokasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur empiris tentang efektivitas kebijakan MBKM, tetapi juga menyediakan data berbasis bukti *(evidence-based)* yang dapat digunakan sebagai landasan perumusan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih responsif terhadap kebutuhan dunia kerja.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Kurikulum Merdeka

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan program transformasi pendidikan tinggi yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi selama tiga semester. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengurangi kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Dalam konteks magang, program MBKM memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman langsung di dunia profesional, dengan harapan pengalaman ini dapat memperkuat keterampilan kerja dan kesiapan lulusan menghadapi tantangan dunia kerja (Kemendikbudristek, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Arisandi et al. (2022) menunjukkan bahwa partisipasi mahasiswa dalam program magang MBKM secara signifikan meningkatkan kemampuan adaptasi, keterampilan kerja sama, dan pemahaman terhadap dunia kerja. Hal ini mendukung asumsi bahwa MBKM berperan dalam mempercepat waktu tunggu mahasiswa untuk memperoleh pekerjaan pasca-kelulusan.

Implementasi MBKM di Perguruan Tinggi

Implementasi MBKM sangat tergantung pada kesiapan internal perguruan tinggi, termasuk infrastruktur, regulasi akademik, dan keterlibatan mitra industri atau lembaga non akademik. Beberapa studi menunjukkan bahwa keberhasilan MBKM sangat dipengaruhi oleh pemahaman dosen terhadap konsep merdeka belajar dan fleksibilitas kurikulum di tingkat program studi (Baharuddin, 2021). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), khususnya jurusan seperti Administrasi Negara, memiliki peluang untuk menerapkan program MBKM melalui magang di instansi pemerintah, riset kebijakan, hingga kegiatan berbasis pengabdian masyarakat.

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Namun, tantangan seperti minimnya mitra, birokrasi internal, dan kurangnya pendampingan akademik masih menjadi kendala (Santoso et al., 2022; Hastuti et al., 2022).

Persepsi dan Pengalam Mahasiswa terhadap MBKM

Magang merupakan bentuk pembelajaran di luar kelas yang mempertemukan mahasiswa dengan pengalaman kerja nyata. Dalam konteks MBKM, magang menjadi jembatan penting yang menghubungkan kurikulum pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri. Mahasiswa yang mengikuti magang cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap proses bisnis, tuntutan dunia kerja, dan ekspektasi profesionalisme (Silva et al., 2018). Penilaian terhadap program MBKM tidak hanya bisa dilihat dari aspek struktural, tetapi juga dari sudut pandang mahasiswa sebagai subjek utama kebijakan. Persepsi mahasiswa terhadap manfaat, hambatan, dan relevansi program MBKM berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasinya (Kamalia, 2021). Mahasiswa yang aktif mengikuti program MBKM menunjukkan peningkatan dalam soft skill, pengalaman lapangan, dan orientasi karier, meskipun di sisi lain menghadapi kendala administratif dan kesulitan adaptasi.

Studi Komparatif

Studi komparatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok berdasarkan variabel tertentu. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini berguna untuk menilai efektivitas suatu kebijakan atau program. Studi komparatif dapat mengungkapkan perbedaan signifikan dalam pengalaman dan capaian antara kelompok eksperimen (misalnya mahasiswa yang mengikuti MBKM) dan kelompok kontrol (yang tidak mengikuti MBKM) (Sugiyono, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kuantitatif komparatif dengan pendekatan deskriptif dan inferensial, karena bertujuan untuk membandingkan penerapan Kurikulum Merdeka Belajar antara dua kelompok mahasiswa—yakni mahasiswa yang mengikuti program MBKM secara penuh dan mahasiswa yang tidak mengikuti program MBKM. Pendekatan ini dipilih untuk mengetahui perbedaan persepsi, efektivitas pembelajaran, dan capaian kompetensi dari kedua kelompok tersebut Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Waktu pelaksanaan penelitian

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

direncanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2025, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung. Teknik pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling, yaitu dengan membagi mahasiswa berdasarkan dua kategori; Mahasiswa yang telah mengikuti program Merdeka Belajar (misalnya magang, studi independen, atau pertukaran mahasiswa); Mahasiswa yang tidak mengikuti program MBKM.

Metode pengumpulan data meliputi; Wawancara semi-terstruktur, dilakukan pada sejumlah informan kunci (dosen, koordinator MBKM, dan perwakilan mahasiswa) untuk memperkuat data kuantitatif dan memberikan konteks; Dokumentasi, meliputi data akademik, program MBKM yang diikuti, dan kebijakan kurikulum yang diterapkan.

Teknik Analisa Data, analisis deskriptif (mean, persentase), Uji beda independen (Independent Samples t-test atau Mann-Whitney U) untuk melihat perbedaan antara dua kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung dirancang dan diperbarui melalui proses yang kolaboratif dan inklusif, yang memastikan keselarasan dengan perkembangan terkini di bidang administrasi publik dan tuntutan pasar tenaga kerja. Pengembangan kurikulum dipandu oleh prinsip-prinsip berikut: 1) Relevansi dengan kebutuhan sektor publik saat ini dan masa depan, 2) Keselarasan dengan standar nasional dan internasional dalam pendidikan administrasi publik, dan 3) Masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kurikulum mencerminkan berbagai perspektif dan persyaratan praktis. Proses penyusunan, evaluasi, dan pemutakhiran kurikulum di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Keterlibatan para pemangku kepentingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum yang disusun relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta mampu mengakomodasi perkembangan terbaru di bidang administrasi publik. Salah satu metode yang dipergunakan dalam proses ini adalah tracer studi, yang dilakukan secara berkala oleh CCED Unila sebagai instrumen utama untuk memperoleh umpan balik mengenai relevansi dan efektivitas kurikulum. Dalam tracer study, program studi secara aktif melibatkan alumni dan pengguna lulusan sebagai narasumber. Hal ini penting untuk mengukur sejauh mana

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

lulusan Program Studi Administrasi Negara terserap di dunia kerja dan bagaimana kontribusi mereka dalam memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, baik di sektor publik maupun swasta. Informasi ini digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian kompetensi yang diajarkan dengan tuntutan profesional di lapangan. Selain sebagai alat evaluasi, tracer study juga memberikan masukan berharga yang digunakan dalam proses pemutakhiran kurikulum. Masukan dari alumni dan pengguna lulusan memungkinkan program studi untuk menyesuaikan materi pembelajaran dan kompetensi lulusan dengan perubahan dan perkembangan terkini dalam administrasi publik dan manajemen sektor publik. Dengan demikian, kurikulum dapat terus diperbarui untuk memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan dapat bersaing di pasar kerja yang semakin dinamis dan kompleks. Melalui keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Unila setidaknya dapat mempertahankan kualitas pendidikan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja, serta meningkatkan daya saing lulusan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Kurikulum ditinjau secara berkala melalui pertemuan pemangku kepentingan, lokakarya, dan diskusi kelompok terarah, untuk memastikan kurikulum tetap responsif terhadap perubahan dalam lanskap administrasi publik. Masukan dari para pemangku kepentingan dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan lokakarya formal yang dilakukan setidaknya sekali setiap dua tahun. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung telah menerapkan pendekatan yang dinamis dan inklusif terhadap tinjauan kurikulum dan peningkatan berkelanjutan. Proses ini memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan sektor publik yang terus berkembang dan dapat disesuaikan dengan kebijakan pendidikan nasional seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dengan melibatkan pemangku kepentingan utama seperti mitra akademis, lembaga publik, dan pemberi kerja secara berkala, Program studi ini mempertahankan kurikulum yang berwawasan ke depan yang membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam lanskap administrasi publik saat ini.

Penerapan Kebijakan Merdeka Belajar

Merdeka Belajar adalah salah satu kebijakan pendidikan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dengan tujuan memberikan kebebasan lebih bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi dan mengembangkan kompetensinya di luar batasan batasan tradisional yang ada dalam kurikulum perguruan tinggi. Konsep Merdeka Belajar bertujuan untuk mengatasi

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

tantangan yang ada di dunia pendidikan tinggi, terutama dalam menghadapi tuntutan perubahan cepat di era digital dan globalisasi yang mengharuskan lulusan perguruan tinggi memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan serta aplikatif di dunia kerja. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi memiliki implikasi yang signifikan dalam penerapan MBKM di Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung (Unila). Regulasi ini menuntut perubahan signifikan dalam sistem pendidikan, khususnya pada aspek implementasi kurikulum berbasis proyek, asesmen kompetensi lulusan, dan integrasi pembelajaran MBKM. Kebijakan Merdeka Belajar, dengan berbagai programnya seperti magang, pertukaran pelajar, dan proyek riset, memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Hal ini bisa membantu mahasiswa untuk lebih fokus pada pembelajaran berbasis pengalaman, yang pada gilirannya dapat mempercepat penyelesaian studi mereka. Di sisi lain, kebijakan ini juga dapat berdampak pada kelulusan tepat waktu jika mahasiswa tidak dapat mengelola waktu dengan baik antara kegiatan MBKM dan tugas akademik mereka. Kelulusan tepat waktu adalah tujuan penting yang diharapkan oleh perguruan tinggi, mahasiswa, dan orang tua, serta menjadi salah satu indikator keberhasilan sistem pendidikan tinggi. Di perguruan tinggi, kelulusan tepat waktu umumnya mengacu pada kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan studi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan durasi yang tercantum dalam kurikulum yang berlaku. Di Indonesia, rata-rata waktu studi untuk program Sarjana (S1) adalah 3 hingga 4 tahun, meskipun program studi tertentu, seperti teknik atau kedokteran, bisa memakan waktu lebih lama. Kelulusan tepat waktu sangat berkaitan dengan kualitas dan efisiensi proses pendidikan yang diterima mahasiswa selama masa studi mereka.

Faktor yang Mempengaruhi Kelulusan Tepat Waktu adalah kurikulum yang efektif dan fleksibel, kurikulum yang terstruktur dengan baik sangat mempengaruhi kelulusan tepat waktu. Pengaturan mata kuliah yang jelas, jadwal yang terorganisir, dan adanya fleksibilitas dalam memilih program dapat membantu mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu. Program Merdeka Belajar yang diperkenalkan oleh Kemendikbud (2020) memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti program-program di luar kampus, seperti magang, penelitian, atau pertukaran pelajar, yang jika dikelola dengan baik dapat mempercepat proses kelulusan mahasiswa (Kemendikbudristek, 2020). Skema MBKM Jurusan Administrasi Negara menurut

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

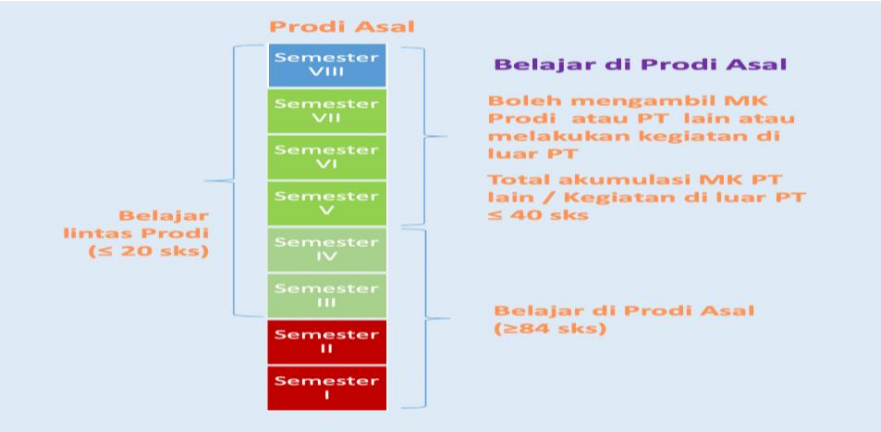
Dokumen Kurikulum Jurusan Administrsi Negara 2025 mengadopsi 6 skema dari 8 skema yang ditawarkan Kementerian dan Kebudayaan, Pendidikan tinggi Republik Indonesia. Tahapan dan skema diuraikan sebagai berikut:

a) Melakukan penyesuaian kurikulum sesuai dengan ketentuan 20 sks program MBKM yang akan dikonversi dengan mata kuliah-mata kuliah yang sesuai atau memiliki capaian kegiatan yang setara dengan capaian pembelajaran matakuliah-matakuliah yang ada di dalam kurikulum.
b) Merinci program MBKM yang bisa disetarakan dengan mata kuliah-mata kuliah pada semester 5, 6, dan 7.
c) Bentuk kegiatan sejalan dengan target capaian kurikulum yaitu; Program Pertukaran Pelajar (pembelajaran/kuliah di luar program studi), Program Magang/Praktek Kerja, Program Proyek di Desa, Program Penelitian/Riset, Program Kegiatan Wirausaha, dan Program Proyek Kemanusiaan

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya (Kemendikbud, 2020). Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk: a. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. b. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Model implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi maksimum 3 semester seperti terlihat pada skema di bawah ini.

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Gambar 1. **Model implementasi Pembelajaran di Luar Prodi**



Sumber: Dokumen Kurikulum Jurusan Administrasi Negara, 2025

Dibawah ini merupakan jumlah peserta yang terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Administrasi Negara yang mengikuti program MBKM;

Tabel 5.1 Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara Peserta MBKM dan Non MBKM

Angkatan	Jumlah Mahasiswa	Mahasiswa MBKM	Mahasiswa Non MBKM	Presentase mahasiswa MBKM
2018	93	74	19	79,5%
2019	73	73	0	100%
2020	97	97	0	100%
2021	148	66	82	44,5%

Sumber: Jurusan Administrasi Negara, 2025

Tabel di atas menggambarkan distribusi mahasiswa Jurusan Administrasi Negara yang mengikuti Program MBKM dan Non-MBKM, berdasarkan angkatan. Data ini mencakup mahasiswa dari angkatan 2018 hingga 2021.

Pada angkatan 2018, dari 93 mahasiswa yang tercatat, sebanyak 74 mahasiswa mengikuti Program MBKM, sementara 19 mahasiswa tidak mengikuti program tersebut. Dengan demikian, persentase mahasiswa MBKM pada angkatan ini mencapai 79,5%.

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Pada angkatan 2019, seluruh 73 mahasiswa yang terdaftar mengikuti Program MBKM, sehingga persentase mahasiswa MBKM untuk angkatan ini adalah 100%. Tidak ada mahasiswa yang tercatat sebagai peserta Non-MBKM pada tahun ini.

Angkatan 2020 menunjukkan angka yang sama dengan angkatan 2019, di mana 97 mahasiswa mengikuti Program MBKM, sementara tidak ada mahasiswa yang terdaftar sebagai Non-MBKM. Dengan demikian, persentase mahasiswa MBKM pada angkatan 2020 juga mencapai 100%.

Namun, pada angkatan 2021, data menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah mahasiswa yang mengikuti Program MBKM. Dari 148 mahasiswa, hanya 66 mahasiswa yang terlibat dalam MBKM, sementara 82 mahasiswa lainnya tidak mengikuti program tersebut. Persentase mahasiswa MBKM pada angkatan 2021 adalah 44,5%, yang mencerminkan penurunan dibandingkan dengan angkatan sebelumnya. Secara keseluruhan, terdapat tren yang berbeda dalam partisipasi mahasiswa dalam Program MBKM. Pada angkatan 2019 dan 2020, hampir seluruh mahasiswa terlibat dalam program tersebut, namun pada angkatan 2021, partisipasi mahasiswa dalam MBKM mengalami penurunan yang signifikan, karena pada angkatan 2021 Jurusan Administrasi Negara menerapkan kebijakan MBKM dengan syarat, seperti yang disampaikan Ketua Jurusan Administrasi Negara berikut: “pada angkatan 2021 kami memberlakukan kebijakan pengumpulan outline skripsi sebagai salah satu syarat mahasiswa bisa mengikuti program MBKM, karena melihat kelulusan tepat waktu mahasiswa angkatan sebelumnya yang relatif rendah yaitu 39,17%”

Pendapat tersebut sejalan dengan data dibawah ini:

Tabel 2. Jumlah Mahasiswa dengan Kelulusan Tepat Waktu

Angkatan	Jumlah mahasiswa	Mahasiswa Lulus Tepat Waktu	Presentase
2018	81	30	37,03%
2019	73	41	56,16%
2020	97	38	39,17%

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

2021	148	55	37,7%

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Tabel di atas menunjukkan data kelulusan tepat waktu mahasiswa Program Studi Administrasi Negara berdasarkan angkatan, dengan informasi mengenai jumlah mahasiswa dan presentase kelulusan tepat waktu. Data ini mencakup mahasiswa dari angkatan 2018 hingga 2021. Pada angkatan 2018, dari 81 mahasiswa yang terdaftar, hanya 30 mahasiswa yang berhasil lulus tepat waktu, yang mencakup 37,03% dari total jumlah mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa dari angkatan ini membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan studi mereka. Angkatan 2019 mencatatkan angka kelulusan tepat waktu yang lebih tinggi, yaitu 56,16%. Dari 73 mahasiswa yang terdaftar, sebanyak 41 mahasiswa lulus tepat waktu. Persentase ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan angkatan 2018, yang mencerminkan kemungkinan adanya perbaikan dalam faktor-faktor pendukung kelulusan tepat waktu, seperti kurikulum atau sistem pembelajaran. Pada angkatan 2020, jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu turun kembali menjadi 39,17%. Dari 97 mahasiswa yang terdaftar, hanya 38 mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi mereka sesuai jadwal. Hal ini yang menjadi dasar Jurusan Administrasi Negara menerapkan Kebijakan MBKM bersyarat tersebut untuk mempercepat kelulusan tepat waktu diangkatan berikutnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada, program MBKM mampu mengurangi waktu tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan. Mahasiswa yang terlibat dalam program MBKM mengalami peningkatan dalam hal keterampilan profesional dan soft skills yang dibutuhkan di dunia kerja, sehingga mereka lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja (UGM, 2021). Dari data ini, kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun Program MBKM sangat populer di kalangan mahasiswa pada angkatan sebelumnya, terdapat penurunan yang perlu dianalisis lebih lanjut, terutama pada angkatan 2020. Dari segi kemampuan kognitif lulusan, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3. Rata-rata IPK Lulusan

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Angkatan	Rata-rata IPK lulusan
2018	3, 54
2019	3,71
2020	3,6
2021	3,7

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Tabel di atas menunjukkan rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan Program Studi Administrasi Negara dari tahun 2018 hingga 2021. Rata-rata IPK ini memberikan gambaran tentang kualitas akademik lulusan dari masing-masing angkatan.

Pada angkatan 2018, rata-rata IPK lulusan tercatat sebesar 3,54. Angka ini menunjukkan bahwa lulusan tahun tersebut memiliki performa akademik yang baik, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan angkatan berikutnya. Angkatan 2019 menunjukkan peningkatan, dengan rata-rata IPK mencapai 3,71. Ini menunjukkan bahwa lulusan angkatan 2019 cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih tinggi, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti peningkatan kualitas pengajaran atau program akademik yang lebih efektif. Pada angkatan 2020, rata-rata IPK sedikit menurun menjadi 3,6. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan angkatan 2019, angka ini tetap menunjukkan kualitas akademik yang baik dan tidak terlalu jauh dari nilai pada tahun 2018. Berdasarkan berbagai riset yang dilakukan mengenai hubungan antara kemampuan kognitif mahasiswa, yang diukur melalui Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dan dampaknya terhadap partisipasi dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara keduanya. Pertama, program MBKM memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kognitif mereka secara lebih holistik, dengan menawarkan berbagai pengalaman di luar perkuliahan tradisional, seperti magang, proyek penelitian, dan pengabdian masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Suryani dan Nasir (2021), partisipasi dalam MBKM membantu mahasiswa mengasah keterampilan praktis yang mendalam, yang berkontribusi pada peningkatan kognitif mereka, terutama dalam hal kemampuan analitis dan pemecahan masalah. Oleh karena

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

itu, meskipun IPK adalah indikator kognitif utama yang digunakan untuk menilai kemampuan akademik, pengalaman praktis yang diperoleh melalui MBKM dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa, yang pada gilirannya memperkuat kapasitas intelektual mereka. Namun, riset juga menunjukkan bahwa pengaruh MBKM terhadap IPK mahasiswa dapat bervariasi tergantung pada sejauh mana mahasiswa dapat mengelola waktu mereka antara kegiatan MBKM dan studi akademik. Penelitian oleh Wahyudi dan Siti (2018) mengungkapkan bahwa beberapa mahasiswa mengalami penurunan IPK setelah mengikuti program MBKM karena terlalu banyak fokus pada kegiatan eksternal, yang dapat mengalihkan perhatian mereka dari tugas akademik. Namun, di sisi lain, penelitian oleh Budianto (2020) menunjukkan bahwa mahasiswa dengan IPK yang lebih tinggi cenderung lebih terorganisir dalam mengikuti program MBKM dan mengelola waktu mereka dengan lebih baik, yang pada akhirnya memungkinkan mereka untuk memaksimalkan manfaat dari program tersebut tanpa mengorbankan performa akademik mereka. Dengan demikian, meskipun IPK tetap menjadi indikator penting untuk menilai kemampuan kognitif mahasiswa, partisipasi dalam MBKM memberikan peluang yang signifikan untuk pengembangan keterampilan praktis yang mendalam. Namun, untuk memastikan keberhasilan program ini dalam mendukung kemampuan kognitif mahasiswa, penting bagi perguruan tinggi untuk memberikan bimbingan dan dukungan yang memadai dalam mengelola keseimbangan antara kegiatan MBKM dan studi akademik.

Dampak Kebijakan Merdeka Belajar

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Nasir (2021), MBKM memberikan dampak positif terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengikuti program magang dan riset melalui MBKM cenderung memiliki keterampilan kerja yang lebih baik, termasuk keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan manajemen waktu. Program MBKM juga meningkatkan pengetahuan mereka tentang dunia industri dan pekerjaan yang akan mereka jalani setelah lulus. Selain itu, hasil dari Studi Dampak Kompetensi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) juga mengungkapkan bahwa peserta program MBKM memiliki waktu tunggu kerja tiga bulan lebih singkat dibandingkan dengan lulusan yang tidak mengikuti

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

program tersebut. Lebih jauh waktu tunggu lulusan Jurusan Administrasi Negara dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4. Waktu Tunggu Lulusan Program Studi Administrasi Negara

No.	Angkatan	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah Lulusan Terlacak dengan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan		
				WT < 3 bulan	6 ≤ WT bulan	WT > 6 bulan
1	**2018**	72	57	26	33	24
2	**2019**	53	47	16	26	21
3	**2020**	36	31	13	23	8
4	**2021**	19	-	-	-	-
Jumlah		180	135	55	82	53

Sumber: Tracer Unila, 2025

Tabel di atas menunjukkan perkembangan jumlah lulusan dari Program Studi Administrasi Negara berdasarkan angkatan, serta informasi terkait waktu tunggu mereka dalam memperoleh pekerjaan. Data ini mencakup lulusan dari angkatan 2018 hingga 2021, dengan total jumlah lulusan yang tercatat sebanyak 180 orang.

Untuk angkatan 2018, dari 72 lulusan yang dihasilkan, 57 di antaranya berhasil terlacak. Dari jumlah tersebut, 26 lulusan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 3 bulan, 33 lulusan dalam rentang waktu 6 bulan atau kurang, dan 24 lulusan membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan untuk memperoleh pekerjaan.

Pada angkatan 2019, sebanyak 53 lulusan tercatat, dengan 47 lulusan terlacak. Sebanyak 16 lulusan memperoleh pekerjaan dalam waktu kurang dari 3 bulan, 26 lulusan dalam waktu 6 bulan atau kurang, dan 21 lulusan membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan.Angkatan 2020 mencatatkan 36 lulusan, dengan 31 lulusan yang terlacak. Di antara lulusan yang terlacak, 13 berhasil mendapat pekerjaan dalam waktu kurang dari 3 bulan, sementara 23 lulusan membutuhkan waktu 6 bulan atau lebih, dan hanya 8 lulusan yang memperoleh pekerjaan setelah lebih dari 6 bulan. Angkatan 2021 hanya mencatatkan 19 lulusan, namun data mengenai waktu tunggu mereka belum terlacak atau tersedia. Secara keseluruhan, dari 180 lulusan yang

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

terdata, 135 lulusan dapat terlacak, dengan rincian 55 lulusan memperoleh pekerjaan dalam waktu kurang dari 3 bulan, 82 lulusan dalam waktu 6 bulan atau lebih, dan 53 lulusan membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan untuk memperoleh pekerjaan. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar lulusan memperoleh pekerjaan dalam waktu yang relatif lama, khususnya pada rentang waktu 6 bulan atau lebih. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi kebijakan kurikulum dan program pengembangan karier untuk meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian dari Nastiti (2024), riset menunjukkan bahwa lulusan yang mengikuti program MBKM memiliki waktu tunggu yang lebih singkat untuk mendapatkan pekerjaan. Rata-rata waktu tunggu mereka berkurang signifikan dibandingkan dengan lulusan yang tidak mengikuti program tersebut, yang sebelumnya rata-rata mencapai 10 bulan. Oleh karena itu, agar pelaksanaan kebijakan MBKM dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka Jurusan Administrasi Negara menetapkan beberapa mutu yang dituangkan didalam Dokumen Kurikulum Jurusan Administrasi Negara 2025, antara lain:

1. Mutu kompetensi peserta Mengacu pada kesiapan mahasiswa sebelum mengikuti kegiatan MBKM. Meliputi kompetensi akademik (penguasaan materi dasar dan prasyarat), kompetensi non-akademik (soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen waktu), serta etika profesional. Standar mutu dapat diukur melalui IPK minimal, portofolio, hasil tes kemampuan, atau rekomendasi dosen pembimbing. Tujuannya agar peserta yang dikirim sudah siap dan mampu mengambil manfaat optimal dari program MBKM.
2. Mutu pelaksanaan Berhubungan dengan bagaimana program MBKM dijalankan secara keseluruhan. Termasuk kejelasan jadwal kegiatan, kesesuaian output dengan tujuan pembelajaran, kelancaran koordinasi dengan mitra, serta kepatuhan terhadap pedoman MBKM yang ditetapkan universitas dan kemendikti saintek. Mutu pelaksanaan juga mencegah adanya missed target, keterlambatan, atau kegiatan yang tidak sesuai perencanaan.
3. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal Terdapat pembimbing internal yakni dosen dari program studi yang bertugas memastikan kegiatan mahasiswa relevan dengan capaian pembelajaran program studi (CPL-PS). Kemudian terdapat juga

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

pembimbing eksternal: pihak mitra (perusahaan, instansi, LSM, atau lembaga lain) yang memberikan arahan teknis di lapangan. Standar mutu di sini mencakup intensitas bimbingan, keterbukaan komunikasi, kualitas umpan balik (feedback), dan adanya dokumentasi kemajuan.

Meskipun kebijakan ini memiliki tujuan yang mulia, pelaksanaannya tidak berjalan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah infrastruktur pendidikan yang masih belum merata di seluruh Indonesia. Banyak perguruan tinggi, terutama di daerah terpencil, yang belum sepenuhnya siap untuk mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar. Masalah lain yang dihadapi adalah kesiapan dosen dan tenaga pengajar dalam mengadaptasi teknologi dan metode pembelajaran yang lebih fleksibel. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah resistensi terhadap perubahan. Sebagian kalangan, baik dari sisi pengajar maupun mahasiswa, merasa lebih nyaman dengan sistem pendidikan yang telah ada, yang lebih terstruktur dan tradisional. Dalam sebuah penelitian, Sukardi (2020) menyatakan bahwa "penerapan kebijakan Merdeka Belajar membutuhkan perubahan paradigma yang besar dalam sistem pendidikan Indonesia yang selama ini lebih terfokus pada ujian dan hasil akademik semata." Selain itu, meskipun program MBKM memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk memilih jalur pendidikan mereka, kurangnya koordinasi antara perguruan tinggi dengan dunia industri sering kali menjadi kendala. Beberapa perusahaan dan institusi masih belum sepenuhnya mendukung program magang atau kerja sama yang disyaratkan dalam kebijakan ini, yang berdampak pada terbatasnya kesempatan bagi mahasiswa untuk benar-benar mendapatkan pengalaman praktis yang mereka butuhkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) di Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung berdampak positif terhadap pengalaman belajar, kelulusan tepat waktu, kesiapan kerja, dan daya saing lulusan. Meskipun tingkat partisipasi MBKM bervariasi antarangkatan dan implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan mitra, kesiapan dosen, serta kesiapan mahasiswa, program ini terbukti mampu memperkuat kompetensi teknis, soft skills, dan pengalaman lapangan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas dosen, penguatan kolaborasi dengan dunia usaha

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

dan dunia industri, serta penyediaan dukungan kebijakan dan fasilitas yang memadai agar implementasi MBKM semakin optimal dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global.

DAFTAR PUSTAKA

Semua referensi yang dikutip/disitasi dalam naskah artikel harus dicantumkan dalam bagian Daftar Pustaka. Daftar Pustaka harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal dari sumber primer (jurnal ilmiah; minimum 80%) dari keseluruhan daftar pustaka) diterbitkan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Jumlah referensi yang disitasi minimal 10 (lima belas) sumber pustaka. Penulisan kutipan atau sitasi disarankan menggunakan program aplikasi manajemen referensi misalnya: Mendeley, Grammarly, End Note, Zotero, atau lainnya. Format penulisan yang digunakan di Demokrasi jurnal Ilmu Pemerintahan adalah APA 6th Edition (American Psychological Association, 2010). Berikut beberapa contoh penulisan daftar pustaka:

Pustaka yang Berupa Jurnal Ilmiah:

Arisandi, D., Mutiara, M. W., & Mawardi, V. C. (2022). *Dampak kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) magang dan studi independen dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa*. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 6*(1), 174–181. https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.16163.2022

Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran, 4(1), 195–205. https://doi.org/10.30605/jsgp.4.1.2021.591

Fatmawati, E. (2020). Dukungan perpustakaan dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka. Pustakaloka, 12(1), 107–123. https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v12i1.2297

Hastuti, K., Susanti, H., & Erfando, T. (2022). *Evaluasi kebijakan program MBKM dalam meningkatkan capaian pembelajaran lulusan perguruan tinggi*. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 4*(6), 7445–7454. https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i6.4119

Kamalia, P. U., & Andriansyah, E. H. (2021). *Independent Learning–Independent Campus (MBKM) in students' perception*. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan*

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran, 7(4), 857–867. https://doi.org/10.33394/jk.v7i4.4031

Kemendikbudristek. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) untuk Perguruan Tinggi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Diakses dari: https://www.kemdikbud.go.id

Krisnanik, E., Saphira, Q., & Indriana, I. H. (2021). *Desain model MBKM dan kolaborasi kerja sama model pentahelix guna meningkatkan daya saing lulusan*. **Proceeding KONIK (Konferensi Nasional Ilmu Komputer), 5**, 138–142. https://prosiding.konik.id/index.php/konik/article/view/40

Santoso, I., & Setiawan, T. (2021). Strategi Peningkatan Kelulusan Tepat Waktu di Perguruan Tinggi. Jurnal Pendidikan Indonesia, 14(2), 99-110. doi:10.1234/jpi.v14i2.1100

Silva, P., Lopes, B., Costa, M., Melo, A. I., Dias, G. P., Brito, E., & Seabra, D. (2018). *The million-dollar question: Can internships boost employment? Studies in Higher Education, 43*(1), 2–21. https://doi.org/10.1080/03075079.2016.1144181\

UGM. (2021). *Penelitian Mengenai Dampak Program MBKM terhadap Waktu Tunggu Lulusan untuk Mendapatkan Pekerjaan*. Universitas Gadjah Mada. Diakses dari: https://ugm.ac.id

Widiyono, A., Irfana, S., & Firdausa, K. (2021). *Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui program Kampus Mengajar di Sekolah Dasar*. *Metodik Didaktik: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an, 16*(2), 102–107. https://doi.org/10.17509/md.v16i2.30125

Yuherman, Y., Nugroho, W., & Sunarsi, D. (2021). *Dampak kebijakan MBKM pada kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas Fakultas Hukum Usahid Jakarta*. **MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum, 7**(2), 222–244. https://doi.org/10.52947/morality.v7i2.235

Pustaka yang Berupa Buku:

Tohir, M. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Chao, C.-Y., Chen, Y.-T., & Chuang, K.-Y. (2016). *Exploring students' learning attitudes and achievement in experiential learning environments*. *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12*(9), 2413–2423.

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Fryer, L. K., Ainley, M., Thompson, A., Gibson, A., & Sherlock, Z. (2019). *Stimulating and sustaining interest in a language course: An experimental comparison of curiosity and utility interventions*. *Contemporary Educational Psychology, 56*, 139–151.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.